



## Otoped dan Relokasi PKL Malioboro

**LARANGAN** Otoped dari Tugu-Titik Nol, Pimpinan DPRD DIY mendukung (KR, 30/3). Itulah judul berita KR. Tampaknya, otoped atau sepeda listrik menjadi sorotan tajam DPRD-DIY, seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri. Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan HB X menegaskan, sepanjang Jalan Margo Utomo - Titik Nol tidak diperbolehkan penggunaan otoped karena mengganggu pejalan kaki. Larangan lewat Surat Edaran (SE) Gubernur nomor 551/4671 yang mulai berlaku sejak 1 April 2022.

Soal otoped ini ada, setelah terjadi boyongan/relokasi/PKL Malioboro. Selasar maupun trotoar Jalan Malioboro yang kosong dipergunakan untuk kendaraan otoped/sepeda listrik oleh wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Larangan ini sebenarnya sebagai bentuk respons yang dikeluarkan masyarakat pengguna pedestrian Malioboro. Cobalah tengok video-video tentang otoped di YouTube, terutama di kolom komentar banyak yang mengeluh, mengkritik perilaku pengguna otoped dengan sembarangan.

Menengok ke belakang, Boyongan/Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro telah berlangsung, Rabu, 26 Januari 2022. Apakah setelah PKL Malioboro boyongan/relokasi ke Teras Malioboro 1 dan 2, persoalan Malioboro dengan segala kompleksitasnya selesai?

Saat peresmian Teras Malioboro, Sultan HB X menyampaikan kawasan Malioboro akan diusulkan kepada UNESCO untuk dijadikan Kawasan Cagar Budaya Malioboro. Diperkirakan sekitar Juli 2022 tim UNESCO akan melihat kondisi Malioboro. Untuk persiapan itu Malioboro harus ditata, termasuk relokasi PKL. Bangunan, fasad sepanjang Jalan Malioboro dikembalikan ke aslinya.

### Pedestrian Malioboro

Kawasan Malioboro diproyeksikan seba-

### Jayadi Kasto Kastari

gai Kawasan Cagar Budaya. Gubernur DIY mengajak Walikota dan Wawali melihat langsung kondisi terkini Pedestrian Malioboro. "Setelah relokasi PKL Malioboro, kalau ada yang rusak seperti lampu, bangku, keramik rusak, saluran limbah dan lain-lain harus dibenahi sampai 3 bulan ke depan. Penataan terus berlanjut. Bersama pemilik toko, bangunan dan fasad Malioboro dikembalikan ke aslinya, bangunan dicat putih," kata Gubernur DIY, Sultan HB X menginginkan, Malioboro harus semakin nyaman bagi wisatawan. Selama Malioboro kosong setelah relokasi PKL Malioboro perlu diagendakan dengan pentas seni-budaya, street art setiap Selasa dan Sabtu, setiap minggunya.

Masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) untuk menuju kawasan cagar budaya. Itu perlu diurai dan dicarikan solusinya. Tentu, banyak hal perlu dibenahi, seperti memperhatikan kebersihan, kenyamanan, keindahan dan ketertiban Malioboro. Yogyakarta memang harus beradab!

Maksudnya, tata krama, perilaku baik ucapan, pikiran dan tindakan. Ada semangat keramahmataman, kebersamaan, gotong-royong, lung-tin-ulung/saling membantu tanpa pamrih. Cagar budaya sebenarnya tidak hanya bangunan secara fisik, juga nonfisik, tetapi perilaku manusianya yang beradab. Perilaku bisa tercermin di Malioboro.

Contoh kasus otoped, bisa menjadi pelajaran. Banyak penyewa otoped menggunakan secara sembarangan, yakni 'turun' jalan dengan melawan arus, seperti dari Titik Nol ke arah utara. Juga trotoar toko digunakan dengan seenaknya sendiri untuk

jalur otoped.

Bisnis penyewaan otoped ada setelah relokasi PKL Malioboro pindah Teras Malioboro 1-2. Bisnis ini sangat menggiurkan. Setiap malam mampu menyewakan 50 buah otoped. Setiap jamnya Rp 35.000 - Rp 40.000. Terlambat 15 menit didenda Rp 10.000. Hitung sendiri berapa pendapatannya?

Selama ini, dari pengakuan pelaku penyewaan otoped — sebelum dilarang, belum ada aturan yang jelas dan pembinaan dari dinas terkait. Dan ini sejatinya peluang bisnis yang mampu dibaca. Mereka yang menyewa itu rindu akan eksistensi diri, kelompok, komunitas atau sekadar 'mengkonkritkan' kenangan, kerinduan berfoto/swafoto di Tugu Yogya, kawasan Malioboro. Penyair Joko Pinurbo (Jokpin) mencatat, Yogya terbuat dari Rindu, Pulang dan Angkringan. □

*\*) Jayadi Kasto Kastari, Wartawan SKH Kedaulatan Rakyat, Anggota Jogja Content Creator.*

### Pojok KR

Bila remaja kluyuran malam, bakal diproses hukum.

**-- Aksi kejahatan biasanya diawali dengan kluyuran.**

\*\*\*

Pemda dan Polda DIY komitmen berantas kejahatan jalanan.

**-- Tak cukup komitmen, butuh aksi nyata.**

\*\*\*

Ganjar dinilai tegas beri instruksi gegah korupsi.

**-- Persoalannya, dilaksanakan atau tidak.**

*Beraks*

| Instansi                                 | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|--|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Perhubungan                     | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Sat Pol PP                            |              |       |                 |
| 3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya |              |       |                 |

Yogyakarta, 21 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005